

Strategi kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 dalam perspektif Madilog Tan Malaka

The Prabowo-Gibran 2024 Election campaign strategy from Tan Malaka's Madilog perspective

**Arnis Desgita Eka Putri¹, Maizia Hariyanti Zahra², Mohammad Rayhan Hidayat³, Sayyid
Verrel⁴, Sisilia Candra Tridjadja⁵, Fathur Rizqi Ramadhan⁶, Jerry Indrawan⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Departemen Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*E-mail: 2410413104@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article History: Received 7 July 2025; Accepted 16 September 2025

Abstract: This study analyzes the campaign strategy of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka in the 2024 presidential election through Tan Malaka's Madilog philosophical framework, aiming to uncover fundamental contradictions between political rationality and contemporary mysticism in Indonesian democracy. By employing a philosophical-critical approach and a hermeneutic method, this research uses the three pillars of Madilog (Materialism, Dialectics, and Logic) as tools for systematic analysis of modern electoral phenomena. The findings reveal that the pair's electoral success was achieved through strategies diametrically opposed to Madilog's principles: substantive policy has been replaced by symbolic manipulation, advanced technology is used to perpetuate political irrationality, and a "modern mystical logic" dominates, obscuring the critical thinking of the masses. Paradoxically, the public's skeptical response to the campaign promises reflects an intuitive application of Madilog's principles by society, highlighting a gap between the people's critical awareness and the quality of political discourse among the elite.

Keywords: Madilog, political communication, campaign, electoral rationality, Prabowo-Gibran.

PENDAHULUAN

Madilog, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika, adalah karya agung Tan Malaka yang menjadi salah satu pilar penting pemikiran filsafat modern Indonesia. Karya ini lahir sebagai upaya membangun suatu cara berpikir baru yang menolak logika mistis tradisional masyarakat Indonesia. Tan Malaka memandang pola pikir mistis sebagai penghalang kemajuan nasional; ia mengkritik kebiasaan mengandalkan doa atau legenda daripada kerja konkret. Sebagai ilustrasi, Tan Malaka menegaskan bahwa "lalu-lalang kata kenyang takkan membuat si lapar kenyang, walaupun diucapkan 1001 kali" (Malaka, 1999). Pernyataan ini menekankan bahwa kata-kata manis atau mitos tak menggantikan upaya material untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Madilog menjadikan prinsip ini sebagai dasar epistemologis, menekankan bahwa setiap klaim harus didasarkan pada realitas objektif dan bukti empiris.

Dalam Madilog, Tan Malaka mengintegrasikan aspek materialisme dan dialektika dengan logika kritis guna menghapus segenap takhayul atau kepercayaan gaib yang menghambat kesadaran rasional

masyarakat Indonesia. Ia berargumen bahwa mentalitas feudal yang pasrah, didukung oleh kepercayaan magis, membuat rakyat mudah dimanipulasi. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan ilmu eksakta agar cara berpikir masyarakat terbentuk secara rasional (Malaka, 1999). Dengan demikian, Madilog menggabungkan analisis material kondisi sosial-ekonomi dengan pemahaman dialektis tentang sejarah dan prinsip-prinsip logika, mendorong objektivitas alih-alih hanya mempertahankan tradisi simbolik.

Pada konteks politik kontemporer, relevansi Madilog semakin mendesak karena kampanye modern cenderung mengedepankan pencitraan dan narasi populis. Hal ini tercermin dalam Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan sekitar 58,6% suara sah (Pratama, 2024). Keberhasilan ini banyak dikaitkan dengan strategi pemasaran politik yang berbasis citra pribadi dan janji-janji populis. Misalnya, Prabowo berhasil mengubah citranya dari sosok militer tegas menjadi figur yang lebih ramah dan menghibur bagi generasi muda, menegaskan bahwa kesan visual dan emosional lebih efektif dalam menarik perhatian pemilih daripada retorika tradisional. Fenomena ini menggemarkan peringatan Guy Debord tentang masyarakat tontonan, di mana citra sering diagungkan melebihi realitas (Debord, 1967). Dukungan mereka juga diperkuat lewat media sosial, yaitu analisis konten Instagram resmi pasangan tersebut mengungkapkan perpaduan antara unsur kebijakan, citra pribadi, dan estetika visual yang menarik untuk membangun narasi positif secara sistematis, menggambarkan dominasi narasi digital dan budaya populisme visual dalam ranah politik.

Meski demikian, kemunculan strategi kampanye spektakuler tersebut justru memicu kesadaran kritis publik di era digital, di mana warganet semakin gesit menyoroti ketidaksesuaian antara citra politisi dengan kebijakan riil. Madilog mengajarkan sikap skeptis ilmiah, yakni publik kini makin menuntut bukti konkret dan konsistensi kinerja ketimbang klaim retoris belaka. Tanggapan kritis semacam ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Madilog, seperti kebutuhan akan bukti empiris dan analisis material, mulai menyusup dalam wacana publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah secara sistematis dialektika antara politik citra populis dan pemikiran rasional Tan Malaka untuk mengungkap bagaimana strategi kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sarat simbolisme melambangkan semacam *mysticisme politique* baru, serta bagaimana kesadaran kritis masyarakat mencerminkan warisan Madilog dalam menuntut keselarasan antara narasi politik dan realitas objektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis filosofis-kritis yang mengintegrasikan studi pustaka sistematis dan interpretasi teoretis. Pendekatan ini dipilih karena

memungkinkan pendalaman terhadap asumsi-asumsi epistemologis yang mendasari praktik politik kontemporer. Hal ini selaras dengan prinsip metodologi kritis (Adorno, 1973).

Pengumpulan data mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk memastikan kualitas sumber. Kriteria inklusi mencakup sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer terdiri atas karya asli Tan Malaka, khususnya *Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika*, serta dokumen resmi kampanye Prabowo-Gibran. Sumber sekunder meliputi literatur yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi (SINTA atau Scopus) yang relevan dengan kerangka Madilog dan teori komunikasi politik, terutama yang diterbitkan antara tahun 2015–2024 dan berkaitan dengan pemahaman fenomena politik elektoral Indonesia. Sumber tersier mencakup data statistik resmi dan dokumentasi media yang terverifikasi keasliannya.

Sebagai bagian dari seleksi sumber, kriteria eksklusi juga diterapkan. Publikasi partisan tanpa landasan empiris yang jelas dikesampingkan, demikian pula sumber yang tidak memenuhi standar akademik minimal dan data yang kredibilitasnya tidak dapat diverifikasi. Pendekatan seleksi ini memastikan bahwa hanya literatur dan data yang kredibel yang dianalisis dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka berpikir Madilog dalam tiga tahap sistematis. Tahap pertama, yaitu analisis materialisme, mengevaluasi kondisi material objektif dan basis empiris dari strategi kampanye. Tahap kedua, analisis dialektika, menelusuri kontradiksi internal serta dinamika interaksi politik. Tahap ketiga, analisis logika, menilai konsistensi argumentasi dan mengidentifikasi kekeliruan (*fallacy*) dalam narasi politik. Setiap tahap analisis dirancang untuk saling melengkapi dan memberikan pemahaman komprehensif terhadap dinamika politik yang diteliti.

Keabsahan temuan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, *member checking* dengan ahli filsafat politik, serta *peer debriefing* dengan akademisi yang kompeten dalam pemikiran Tan Malaka. Kombinasi strategi validasi ini memastikan integritas dan kredibilitas analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materialisme: Dekonstruksi basis empiris janji politik

Dalam perspektif materialisme yang dikembangkan dalam kerangka Madilog, setiap kebijakan publik seharusnya didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang struktur ekonomi, kapasitas produktif, dan kondisi sosial masyarakat. Prinsip materialisme Tan Malaka menegaskan bahwa analisis politik harus berakar pada realitas material yang terukur dan dapat diverifikasi, bukan pada gagasan idealistik yang terlepas dari kondisi obyektif masyarakat (Malaka, 1999).

Penawaran target pertumbuhan ekonomi 8% oleh pasangan Prabowo–Gibran (Herbowo, 2024) dapat dikategorikan sebagai materialisme semu, karena angka ambisius tersebut dikemukakan tanpa analisis mendalam yang menopangnya. Untuk menelaah masalah ini dari sudut pandang materialisme, perlu

dipertimbangkan struktur ekonomi Indonesia secara komprehensif. Berdasarkan data resmi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010–2023 rata-rata hanya sekitar 4,2–5,8% per tahun, sementara struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh sektor primer tanpa transformasi signifikan menuju industri berteknologi tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Yang menjadi lebih problematis adalah ketidakjelasan pemetaan sektor prioritas dalam kampanye tersebut. Ekonomi Indonesia yang masih sangat tergantung pada ekspor komoditas primer seperti kelapa sawit, batu bara, dan mineral mentah memerlukan transformasi struktural mendasar agar pertumbuhan tinggi berkelanjutan dapat dicapai. Transformasi tersebut memerlukan investasi besar-besaran dalam bidang teknologi, infrastruktur, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan, yang jelas tidak dapat terlaksana dalam waktu singkat. Namun, dalam kampanye tersebut sama sekali tidak dijelaskan sektor mana yang akan menjadi penggerak utama pertumbuhan, jenis investasi yang diprioritaskan, maupun reformasi struktural spesifik yang akan dilakukan.

Sebagai perbandingan, ketika Singapura mentransformasi ekonominya dari negara berkembang menjadi negara maju pada era 1960–1990-an, pemerintahan Lee Kuan Yew justru menyusun *roadmap* sangat terperinci tentang pengembangan industri elektronik, jasa keuangan, dan pelabuhan. Setiap target pertumbuhan disertai dengan analisis mendalam mengenai keunggulan komparatif, rencana pengembangan sumber daya manusia, strategi investasi asing, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan (Soon & Tan, 1994). Berbeda dengan pendekatan ini, target pertumbuhan 8% dalam kampanye Prabowo–Gibran lebih menyerupai slogan politik daripada kebijakan yang didasarkan pada analisis material.

Ketidaaan kajian material semacam itu menunjukkan bahwa janji pertumbuhan 8% lebih bersifat gestur politik daripada kebijakan berbasis prinsip materialisme Madilog. Dalam kerangka materialisme, angka pertumbuhan ekonomi harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor produksi, teknologi, institusi, dan modal manusia, bukan sekadar target yang ditetapkan melalui retorika politik.

Fenomena serupa tampak pada janji program makan siang gratis yang menjadi salah satu sorotan kampanye. Janji pemberian makan siang gratis bagi pelajar tersebut menimbulkan persoalan material yang signifikan. Kebutuhan anggaran yang diperlukan mencapai sekitar Rp450 triliun, setara dengan hampir 15–20% dari total APBN tahunan (Kompas.com, 2024). Sebagai perbandingan, besaran anggaran ini hampir mendekati total biaya program makan siang gratis di 125 negara di dunia (sekitar 35,3 miliar USD) (Global Child Nutrition Foundation (GCNF), 2024).

Dari sudut pandang materialisme, program ini menuntut analisis fundamental terkait *cost-benefit* dan *opportunity cost*. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp450 triliun, pemerintah bahkan dapat membangun ribuan sekolah baru, melatih ratusan ribu guru, atau memberikan beasiswa penuh kepada jutaan siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dari sudut pandang nutrisi, program tersebut juga perlu

dievaluasi secara komparatif dengan intervensi kesehatan lainnya, seperti pemberantasan stunting, penyediaan akses air bersih, maupun peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat.

Rencana awal Tim Kampanye Nasional (TKN) yang akan melaksanakan program ini secara menyeluruh sempat disikapi skeptis oleh publik, dengan kekhawatiran mengenai pembengkakan utang negara dan potensi korupsi. Keresahan ini tidak berlebihan apabila melihat jejak pengelolaan program sosial besar di Indonesia. Program Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai, dan berbagai program bantuan sosial lainnya kerap menghadapi masalah distribusi, korupsi, dan ketidaktepatan sasaran. Lebih jauh lagi, dalam kampanye tersebut tidak dijelaskan secara rinci sumber pendanaan riil (misalnya, apakah melalui pinjaman atau *refocusing* anggaran) maupun mekanisme operasional yang akan digunakan.

Pertanyaan-pertanyaan mendasar dari sudut pandang materialisme masih belum terjawab dalam program ini. Misalnya, bagaimana sistem pengadaan makanan akan dijalankan agar terhindar dari monopoli dan korupsi? Apakah infrastruktur dapur dan distribusi di sekolah-sekolah terpencil sudah memadai? Bagaimana standar gizi dan keamanan pangan akan dijaga secara merata di seluruh nusantara? Tanpa adanya kejelasan operasional semacam ini, banyak pihak mempertanyakan apakah alokasi anggaran triliunan rupiah untuk program makan siang benar-benar lebih efektif dibandingkan jika dana tersebut diinvestasikan di sektor pendidikan atau kesehatan.

Sebagai contoh, daripada memberikan makan gratis, mungkin lebih bermanfaat untuk membangun infrastruktur sekolah, meningkatkan pelatihan guru, atau memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat secara materialis cenderung mempertimbangkan prioritas kebijakan berdasarkan cara dana publik dapat menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi rakyat secara langsung.

Dialektika: Kontradiksi modernitas teknologi dan irasionalitas politik

Kampanye Prabowo–Gibran menampilkan sebuah kontradiksi kompleks antara modernitas teknologi dan irasionalitas politik yang menghasilkan fenomena unik dalam sejarah politik Indonesia. Menurut kerangka Madilog, kontradiksi semestinya menjadi pendorong perubahan menuju sintesis yang lebih rasional (Malaka, 1999), namun dalam kasus ini dialektika tersebut justru mengarah pada regresi berupa apa yang dapat disebut “mistisisme teknologi”.

Di satu sisi (tesis), modernisasi teknologi tampak dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan avatar “chibi” Prabowo, pemanfaatan platform media sosial untuk pemasaran viral, dan analitik *big data* untuk *micro-targeting* pemilih. Teknologi-teknologi ini sesungguhnya memiliki potensi revolusioner dalam meningkatkan partisipasi demokratis dan memperluas akses informasi politik. Misalnya, avatar bertenaga AI memungkinkan interaksi yang lebih personal antara calon dan

pemilih, media sosial memudahkan penyebaran informasi kebijakan, dan analitik *big data* dapat membantu memahami kebutuhan spesifik berbagai segmen masyarakat.

Dari perspektif teoretis, teknologi digital seharusnya dapat memperdalam diskursus demokrasi. Kehadiran platform daring memungkinkan debat kebijakan yang lebih substansial, proses pengecekan fakta secara *real-time*, serta partisipasi publik yang lebih inklusif. AI dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan kompleks dan menjelaskannya ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Media sosial pun dapat menjadi ruang deliberasi publik yang memperkaya kualitas demokrasi.

Namun di sisi lain (antitesis), muncul irasionalitas dan manipulasi simbolik secara sistematis. Teknologi canggih tersebut justru digunakan untuk tujuan yang pada dasarnya irasional, menggantikan substansi politik dengan manipulasi emosional dan pencitraan artifisial. Sebagai contoh, konten “gemoy” dan avatar chibi yang dihasilkan dengan teknologi AI tidak memperkaya diskursus politik. Sebaliknya, keduanya justru menjadikan politik sekadar tontonan atau hiburan yang mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substantif.

Kontradiksi ini semakin tajam ketika kita melihat bagaimana teknologi canggih justru dimanfaatkan untuk memproduksi konten-konten yang secara intelektual sangat sederhana. Algoritma *machine learning* yang rumit digunakan untuk menciptakan meme-meme “gemoy”, aplikasi *deepfake* dipakai untuk membuat video viral, dan sistem rekomendasi AI difungsikan untuk menyebarkan konten emosional ketimbang informatif. Inilah yang disebut dengan mistisisme teknologi, yaitu penggunaan teknologi mutakhir untuk melanggengkan logika mistik dalam politik.

Fenomena mistisisme teknologi ini bahkan lebih berbahaya daripada mistisisme tradisional, karena kemajuan teknologi memberikan kesan legitimasi semu bahwa kualitas politik telah meningkat. Ketika kampanye mengandalkan AI dan *big data*, muncul asumsi implisit bahwa pendekatan tersebut lebih “modern” dan “maju” dibandingkan kampanye konvensional. Padahal kenyataannya, substansi politik yang dihasilkan justru mengalami degradasi dari diskusi kebijakan menjadi kultus personalitas, dari analisis rasional menjadi mobilisasi emosional, dari partisipasi substantif menjadi konsumsi hiburan politik.

Di samping aspek teknologi, berbagai kontroversi seputar kampanye memperlihatkan adanya dialektika klasik antara legitimasi formal dan praktik informal yang telah lama mengakar dalam sistem politik Indonesia. Misalnya, terdapat dugaan keberpihakan Presiden Jokowi yang menggunakan posisi dan sumber daya negara untuk mendukung calon tertentu, putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dalam meloloskan pencalonan Gibran meskipun usianya belum memenuhi persyaratan, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang melanggar prinsip netralitas birokrasi, hingga tuduhan *money politics* yang masif.

Kontradiksi antara aturan formal dan praktik informal ini sebenarnya bukan fenomena baru dalam politik Indonesia, namun skalanya kini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif maju untuk mengatur kampanye dan pemilu, termasuk aturan mengenai netralitas birokrasi, pembatasan dana kampanye, dan transparansi. Di sisi lain, praktik politik informal masih sangat kuat, mulai dari politik dinasti, pemanfaatan jabatan untuk kepentingan elektoral, hingga *money politics* yang semakin canggih.

Seluruh aspek ini menunjukkan adanya kontradiksi struktural dalam sistem politik yang masih dipengaruhi oleh logika patrimonial. Meskipun Indonesia telah mengadopsi institusi-institusi demokrasi modern, pola logika kekuasaan yang beroperasi masih condong pada skema tradisional seperti hubungan patron-klien, politik transaksional, dan legitimasi yang berbasis karisma personal dibandingkan pada kebijakan konkret.

Kontradiksi antara prinsip-prinsip integritas pemilu dengan praktik politik oportunistik tersebut memicu perdebatan publik yang intens dan berpotensi merusak legitimasi demokrasi dalam jangka panjang. Ketika masyarakat menyadari bahwa aturan main dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkuasa, kepercayaan terhadap sistem demokrasi menjadi terkikis. Kondisi ini dapat menciptakan siklus negatif di mana politik semakin dipandang sebagai permainan elite yang terpisah dari kepentingan rakyat.

Namun, dari perspektif dialektika Madilog, kontroversi-kontroversi ini juga dapat dipandang sebagai momentum untuk memperbaiki sistem politik. Kejadian-kejadian tersebut menegaskan perlunya penguatan institusi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam proses demokrasi Indonesia. Aksi protes dan kritik publik terhadap berbagai penyimpangan menunjukkan bahwa masyarakat sipil Indonesia masih memiliki kapasitas untuk melawan praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Dialektika antara teknologi modern dan irasionalitas politik, serta antara institusi formal dan praktik informal, pada akhirnya menciptakan kondisi yang berpotensi mendorong munculnya sintesis baru dalam politik Indonesia. Sintesis ini dapat terwujud dalam bentuk penggunaan teknologi yang lebih bertanggung jawab untuk memperkuat diskursus demokrasi, penguatan institusi guna membatasi penyalahgunaan kekuasaan, serta peningkatan literasi politik masyarakat agar mampu membedakan antara substansi dan manipulasi dalam kampanye politik.

Logika: Identifikasi kekeliruan dan inkonsistensi argumentatif

Analisis logis terhadap konstruksi narasi kampanye Prabowo–Gibran mengungkap sejumlah kekeliruan argumentatif yang bersifat sistematis, mencerminkan dominasi “logika mistis” dalam wacana politik elit kontemporer di Indonesia. Menurut kerangka pemikiran Madilog, logika tidak hanya menguji validitas formal suatu argumen, melainkan juga menilai kesesuaian proses penalaran dengan realitas

material dan kepentingan rakyat (Malaka, 1999). Oleh karena itu, setiap argumen politik haruslah koheren secara internal, didukung oleh bukti empiris, dan dapat diverifikasi melalui pengalaman konkret masyarakat.

Salah satu kekeliruan sistematis yang paling mencolok adalah *Fallacy of Misplaced Concreteness* (kesalahan konkritisasi), yaitu kondisi di mana realitas konkret digantikan oleh konstruksi konseptual yang sebenarnya merupakan bentuk abstraksi. Dalam konteks kampanye ini, *branding* “gemoy” terhadap Prabowo dan penggunaan avatar chibi AI menjadi contoh nyata dari kekeliruan tersebut. Persona “gemoy” yang dikonstruksi melalui media sosial dan teknologi digital tampak seolah-olah lebih “nyata” dalam persepsi publik dibandingkan rekam jejak kepemimpinan yang dapat diverifikasi, kebijakan-kebijakan substantif yang pernah diimplementasikan, atau kapabilitas manajerial yang dapat diukur secara objektif.

Fenomena ini bukan sekadar masalah strategi komunikasi, tetapi mencerminkan pergeseran mendasar dalam cara masyarakat memahami realitas politik. Ketika citra yang dikonstruksi secara artifisial mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan fakta historis dan kapabilitas riil, proses penilaian politik menjadi terdistorsi secara serius. Demikian pula, avatar chibi yang diproduksi dengan teknologi AI justru menerima sorotan media dan diskusi publik yang lebih besar dibandingkan analisis mendalam mengenai visi ekonomi, strategi geopolitik, atau rencana reformasi struktural yang ditawarkan oleh kandidat.

Kekeliruan semacam ini sangat berbahaya dalam sistem demokrasi karena mengalihkan perhatian pemilih dari kriteria substantif kepada penanda-penanda superfisial yang mudah dimanipulasi. Madilog menegaskan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin harus didasarkan pada kapasitas riil mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah material yang dihadapi masyarakat, bukan pada kemampuan mereka menciptakan citra yang menarik atau menghibur.

Kekeliruan sistematis berikutnya adalah penalaran sirkular (*circular reasoning*), yaitu situasi di mana premis dan kesimpulan saling mendukung satu sama lain tanpa adanya bukti independen. Hal ini tampak jelas dalam justifikasi kebijakan kampanye yang diberikan secara berulang. Misalnya, target pertumbuhan ekonomi 8% dibenarkan dengan argumen bahwa “Indonesia memerlukan pertumbuhan tinggi untuk mencapai kemakmuran”, sedangkan kebutuhan akan pertumbuhan tinggi itu sendiri dibenarkan dengan merujuk pada target 8% yang telah ditetapkan.

Penalaran sirkular seperti ini menghindari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang seharusnya menjadi landasan kebijakan ekonomi. Mengapa harus 8% dan bukan 6% atau 10%? Apa dasar empiris untuk angka tersebut dan bagaimana kaitannya dengan struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh sektor primer? Apakah pertumbuhan 8% dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak

lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih besar? Bagaimana perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki struktur ekonomi serupa?

Demikian pula, program makan siang gratis dibenarkan dengan klaim retoris “memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia”, sedangkan istilah “yang terbaik” tersebut kemudian didefinisikan ulang sebagai program makan siang gratis itu sendiri tanpa adanya analisis komparatif dengan alternatif lain. Penalaran sirkular semacam ini mengabaikan metodologi evaluasi kebijakan yang seharusnya membandingkan berbagai opsi berdasarkan *cost-effectiveness*, pengukuran dampak, dan analisis keberlanjutan (*sustainability analysis*).

Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah apakah pengalokasian anggaran sebesar Rp450 triliun untuk program ini lebih efektif dibandingkan dengan investasi pada infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, atau program gizi yang lebih ditargetkan untuk mengatasi *stunting*? Tanpa analisis komparatif yang ketat, klaim tentang “yang terbaik bagi anak-anak” hanya menjadi slogan kosong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis.

Kekeliruan ketiga yang sangat prevalen adalah *false dichotomy* (dikotomi palsu), yaitu penyederhanaan kompleksitas politik menjadi pilihan biner artifisial yang tidak mencerminkan ragam pilihan sebenarnya. Kampanye ini secara konsisten *mem-framing* seolah-olah hanya ada pilihan “perubahan versus status quo”, “muda versus tua”, atau “modern versus konservatif”, padahal tidak dijelaskan secara spesifik perubahan apa yang dimaksud, mengapa perubahan tersebut diperlukan, maupun bukti bahwa kandidat yang mengklaim “perubahan” benar-benar memiliki kemampuan mengimplementasikannya.

Dikotomi seperti ini menghambat evaluasi kebijakan secara bernuansa dan mencegah diskusi mendalam tentang *trade-off* yang inheren dalam setiap pilihan politik. Kenyataan pemerintahan jauh lebih kompleks daripada oposisi biner sederhana tersebut, dan kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menavigasi keragaman kepentingan, memahami kompleksitas implementasi kebijakan, serta membuat keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia yang sangat plural dengan keragaman etnis, agama, ekonomi, dan geografis yang luas, dikotomi palsu semacam ini menjadi sangat problematis karena mengabaikan ragam kepentingan dan perspektif masyarakat. Politik yang sehat memerlukan kemampuan untuk mengakomodasi kompleksitas tersebut, bukan menyederhanakannya menjadi pilihan hitam-putih yang artifisial.

Prevalensi kekeliruan-kekeliruan ini menunjukkan dominasi “logika mistis” dalam wacana elite politik saat ini. Dalam kampanye Prabowo–Gibran, logika mistis ini terwujud melalui simbolisasi yang menggantikan argumentasi substantif, justifikasi berputar yang menghindari bukti empiris, serta *framing* retoris yang mereduksi kompleksitas politik menjadi slogan-slogan sederhana.

Padahal, Madilog menekankan pentingnya logika kritis sebagai fondasi demokrasi yang sehat, setiap klaim harus konsisten secara argumentatif, didukung oleh bukti empiris yang dapat diverifikasi, dan proses penalarannya bersifat transparan sehingga dapat dievaluasi oleh publik. Sebagai contoh, masyarakat yang kritis seharusnya menuntut analisis konkret “Mengapa 8%? Apakah angka ini sudah memperhitungkan struktur ekonomi kita yang masih bergantung pada komoditas primer dan rentan terhadap volatilitas harga global?” atau “Jika anggaran Rp450 triliun dialokasikan untuk program makan siang, berapa anak yang sebenarnya dibantu secara efektif, bagaimana pengukuran dampaknya, dan bagaimana perbandingan hasil akhirnya dengan alternatif investasi lain dalam bidang pendidikan atau kesehatan?”

Ketika pertanyaan-pertanyaan materiil dan logis semacam ini tidak dapat dijawab secara memuaskan, maka kerangka logika kampanye dapat dianggap lemah dan tidak memenuhi standar diskursus demokrasi yang sehat. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan mengevaluasi klaim-klaim politik berdasarkan logika yang kuat dan bukti yang dapat diverifikasi.

KESIMPULAN

Analisis komprehensif ini menunjukkan bahwa sebagian besar strategi kampanye Prabowo–Gibran lebih mengedepankan retorika dan manipulasi simbolik daripada kejelasan isi kebijakan yang didasarkan pada realitas material. Dari perspektif materialisme Madilog, janji-janji ekonomi ambisius seperti pertumbuhan 8% dan program sosial besar-besaran seperti makan siang gratis, yang disampaikan tanpa rincian pendanaan, analisis kelayakan, serta rencana operasional yang konkret, memperlihatkan penyimpangan signifikan dari prinsip-prinsip materialisme.

Aspek modernitas teknologi dalam kampanye memang diaplikasikan secara canggih, tetapi ironisnya justru digunakan untuk mereduksi kualitas politik menjadi tontonan tanpa substansi. Inilah sebuah bentuk mistisisme teknologi yang lebih berbahaya daripada mistisisme tradisional karena memberikan legitimasi semu atas degradasi diskursus politik. Dalam aspek logika, narasi kampanye dipenuhi dengan kesalahan logis yang sistematis, di mana abstraksi dan konstruksi simbolik diperlakukan sebagai realitas konkret, argumen saling membenarkan tanpa bukti independen, serta solusi-solusi kompleks disajikan dalam pilihan biner yang menyederhanakan masalah secara berlebihan.



Padahal, filosofi Madilog menekankan bahwa politik yang sehat haruslah bersifat materialis, dialektis, dan logis: kebijakan harus berakar pada analisis kondisi material yang akurat, perbedaan pendapat perlu dipandang sebagai pemicu untuk sintesis yang lebih rasional melalui proses dialektika, serta setiap argumen diuji dengan data konkret dan analisis kritis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan-kesalahan sistematis dalam kampanye ini, jika tidak disadari dan dikritisi oleh masyarakat, berpotensi menyesatkan publik dan merusak proses demokrasi dengan menciptakan ekspektasi yang tidak realistik serta mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang sejatinya memerlukan perhatian.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kampanye politik di Indonesia tidak bisa dipahami semata-mata melalui retorika elektoral atau analisis dangkal tentang strategi komunikasi, melainkan harus ditelaah secara kritis dalam kaitannya dengan struktur material masyarakat, dinamika historis perkembangan demokrasi Indonesia, dan koherensi rasionalitas politik yang melandasi setiap klaim serta janji kampanye. Kerangka Madilog bukan hanya menyediakan alat analisis filosofis yang ampuh, tetapi juga menawarkan perspektif kritis yang sangat relevan untuk membaca realitas politik kontemporer Indonesia yang kerap terjebak dalam paradoks antara modernitas teknologi dan mistisisme politik, antara institusi formal demokrasi dan praktik informal yang masih bersifat feodal, serta antara retorika pembangunan dan realitas struktural yang sejatinya belum berubah secara fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, T. L. W. (1973). *Negative Dialectics* (E. . Ashton (ed.)). Taylor& Francis E-Library.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023*. Bps.Go.Id. <https://jaktimkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/164/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023.html>
- Debord, G. (1967). *The Society of the Spectacle*. Buchet-Chastel.
- Global Child Nutrition Foundation (GCNF). (2024). *School Meal Programs Around the World: Results from the 2024 Global Survey of School Meal Programs*. <http://gcnf.org/global-reports/>
- Herbowo, S. (2024). *Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo-Gibran, Ilusi atau Realistik?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241018113127-14-580767/target-pertumbuhan-ekonomi-8-prabowo-gibran-ilusi-atau-realistik>
- Kompas.com. (2024). *Janji Prabowo-Gibran Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Rp400 T, Uangnya dari Mana?* Kompas.Com. <https://www.kompas.tv/ekonomi/545483/janji-prabowo-gibran-makan-bergizi-gratis-butuh-dana-rp400-t-uangnya-dari-mana?page=all>
- Malaka, T. (1999). *Madilog: materialisme, dialektika, logika Seri pemikiran nasional*. Pusat Data Indikator. https://books.google.co.id/books/about/Madilog.html?id=d9HWAAAAMAAJ&hl=en&redir_es_c=y
- Pratama, F. A. (2024). *KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Rakabuming Pemenang Pilpres 2024*. Tиро.Id. <https://tirto.id/kpu-tetapkan-prabowo-gibran-rakabuming-pemenang-pilpres-2024-gW5f>
- Soon, T. W., & Tan, C. S. (1994). *Singapore : public policy and economic development*.

